

CASCADING KINERJA KECAMATAN TILATANG KAMANG

VISI : Agam Madani Yang Maju, Adil dan Sejahtera											
MISI I : Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional											
TUJUAN Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional											
INDIKATOR Indeks Pelayanan Publik											
SASARAN Terseleenggaranya birokrasi yang kapabel											
INDIKATOR SASARAN Indek Kepuasan Masyarakat											
TUJUAN RENSTRA : Meningkatkan kualitas pelayanan publik											
INDIKATOR TUJUAN : Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan											
Sasaran 1 Terlaksananya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum			Sasaran 2 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Sasaran 3 Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari			Sasaran 4 Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah		
Indikator Sasaran Persentase koordinasi tambuh dan pemerintahan umum yang difasilitasi (Jumlah kegiatan koordinasi tambuh dan pemerintahan umum yang difasilitasi/Jumlah kegiatan koordinasi seluruhnya X 100%)			Indikator Sasaran Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi (Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan SOP/Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik keseluruhannya X 100%)			Indikator Sasaran Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi (Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu/Jumlah nagari seluruhnya X 100%)			Indikator Sasaran Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB		
Strategi Optimalisasi koordinasi ketertaman dan ketertiban umum dengan pihak terkait			Strategi 1) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 2) Optimalisasi Pelayanan Publik			Strategi Optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan			Strategi Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, pengelolaan keuangan dan layanan PD		
Arah Kebijakan 1)Peningkatan koordinasi sinergis penegakan perdatkeda dengan perangkat daerah terkait 2)Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum dengan APH (aparut penegak hukum) 3)Peningkatan koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimca)			Arah Kebijakan 1)Peningkatan koordinasi/ sinergis pelaksanaan sarana kegiatan pemerintahan di kecamatan 2) Peningkatan koordinasi/ sinergis pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 1) Peningkatan koordinasi/ pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha 2) Peningkatan koordinasi/ pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan			Arah Kebijakan 1)Peningkatan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset nagari 2) Peningkatan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di nagari 3)Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 4) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum nagari (berkat penyusunan Pema, Tapal Batas, Pilwena dan Trantumb)			Arah Kebijakan Peningkatan kualitas layanan perangkat daerah Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan Peningkatan kualitas administrasi umum		
Program 1) Program koordinasi ketertaman dan ketertiban umum 2) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			Program Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan			Program Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/ kota		
Indikator Program 1) Persentase koordinasi ketertaman dan ketertiban 2) Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi			Indikator Program Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			Indikator Program Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Indikator Program Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD		
Kegiatan 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum 2) Koordinasi peneltapan dan negosiasi Perda dan Perkada 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai perugasan kepala daerah			Kegiatan 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan 2) Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat			Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Usuan PD Adminitrasi keuangan perangkat daerah Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Adminitrasi barang milik daerah pada PD Adminitrasi Urum PD Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD Penunjang Usuan Pemerintah Daerah		
Indikator Kegiatan Jumlah penyelenggaraan tambuh yang dikoordinasikan			Indikator Kegiatan 1) Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan 2) Jumlah kegiatan pemeliharaan sarpras yang dikoordinasikan 3) Jumlah urusan pemerintahan yang diimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi			Indikator Kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			Indikator Kegiatan Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Persentase terb administrasi barang milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase barang milik daerah yang berkontribusi baik		
Sub Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang/Pelelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergis dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait			Sub Kegiatan 1) Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2) Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Nonperizinan 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi		
Indikator Sub Kegiatan Jumlah rapat koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi (MUI, Bundo Kanduang, KAM)			Indikator Sub Kegiatan Jumlah kegiatan Pemd dan instansi vertikal yang dikoordinasikan (MTQ, PKK, Musrenbang)			Indikator Sub Kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan nagari yang difasilitasi			Indikator Sub Kegiatan Jumlah kegiatan Musrenbang yang difasilitasi 2) Jumlah peralatan kantor dan mesin yang diadatkan 2) Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadatkan 1) Jumlah PNS yang dibayarkan tunjangan 2) Jumlah PTT/Kontrak yang dibayarkan honor dan tunjangan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah laporan penatubuhan barang milik daerah 1) jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2) Jumlah bahan cetak dan konsultasi yang disediakan 3) jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan		